

**"PERSPEKTIF BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG HAK SEWA
BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK WAKAF"
(Studi pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

YESI RAHMAWATI
NPM.1521030441

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440H/2019M**

**"PERSPEKTIF BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG HAK SEWA
BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK WAKAF"
(Studi pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I.

Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440H/2019M**

ABSTRAK

wakaf ialah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah dan lain sebagainya. Dalam perkembangan zaman dilihat dari kekekalan fungsi dan manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak dapat diwakafkan. Barang bergerak yang dapat diwakafkan, seperti uang, saham, kendaraan baik mobil atau pun motor. Benda tersebut juga tidak hanya dapat diwakafkan fungsinya, tetapi manfaat benda tersebut juga dapat di wakafkan, seperti menyewakan wakaf benda bergerak dan hasil sewa tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah salah satu lembaga yang menaungi masalah wakaf baik wakaf harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Lembaga ini sangat membantu dalam hal perwakafan dari akad-akad wakaf, cara mengelola benda wakaf.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Hak Sewa dapat menjadi objek yang produktif ? dan Bagaimana pandangan Badan Wakaf Indonesia tentang Hak Sewa benda bergerak sebagai objek Wakaf ? serta Benda bergerak apa saja yang di kelola oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung ? Adapun tujuan masalah ini adalah untuk mengetahui apakah hak sewa dapat menjadi objek yang produktif untuk menjadi Wakaf dan untuk mengetahui pandangan Badan Wakaf Indonesia tentang Hak Sewa benda bergerak sebagai objek Wakaf. Untuk mengetahui benda bergerak apa saja yang di kelola oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai Perspektif Badan Wakaf Indonesia Tentang Hak Sewa Benda Bergerak Sebagai Objek Wakaf studi pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi data (*sistematising*). Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung selaku lembaga yang mengelola dan membina *Nazhir* mulai banyak mengembangkan dan mengelola wakaf secara langsung. Wakaf yang di kelola berupa wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak. Namun, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung lebih banyak mengelola dan mengembangkan wakaf benda tidak bergerak. Lembaga ini mulai mengembangkan wakaf dengan menyewakan tanah atau bangunan tersebut agar lebih produktif. Sedangkan untuk pengelolaan benda bergerak Badan Wakaf Indonesia baru mulai mengembangkan benda bergerak berupa uang, untuk benda bergerak lainnya lembaga ini belum mengembangkan dan mengelolanya. Wakaf uang yang mereka kembangkan

dengan cara uang yang telah diwakafkan di investasikan ke Bank Syariah dan hasil dari investasi tersebut digunakan untuk membantu masyarakat dengan membangun masjid, sekolah, tempat usaha dan/atau untuk membuat usaha. Terkadang uang yang telah diwakafkan tersebut juga bisa langsung diberikan untuk membantu masyarakat dengan ditukarkan dalam bentuk barang. Untuk penyaluran hasil wakaf tersebut tidak ditentukan tepat atau yayasan yang khusus. Jadi, hasilnya langsung diberikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan, atau untuk membantu pembangunan masjid di daerah sekitar, dan kepada anak yatim di daerah setempat.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703278

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Yesi Rahmawati

NPM : 1521030441

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Perspektif Badan Wakaf Indonesia Tentang Wakaf Hak Sewa Benda Bergerak Sebagai Objek Wakaf (Studi pada Badan Wakaf Provinsi Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I

NIP. 195411131985031001


Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., M.Ag

NIP. 197111061998032005

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perspektif Badan Wakaf Indonesia Tentang Wakaf Hak Sewa Benda Bergerak Sebagai Objek Wakaf (Studi pada Badan Wakaf Provinsi Lampung)**. Disusun oleh **Yesi Rahmawati NPM 1521030441** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Senin, 17 Juni 2019**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Munzir HZ, M.Ag.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Penguji II : Drs. M.Said Jamhari, M.Kom.I

DEKAN

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :

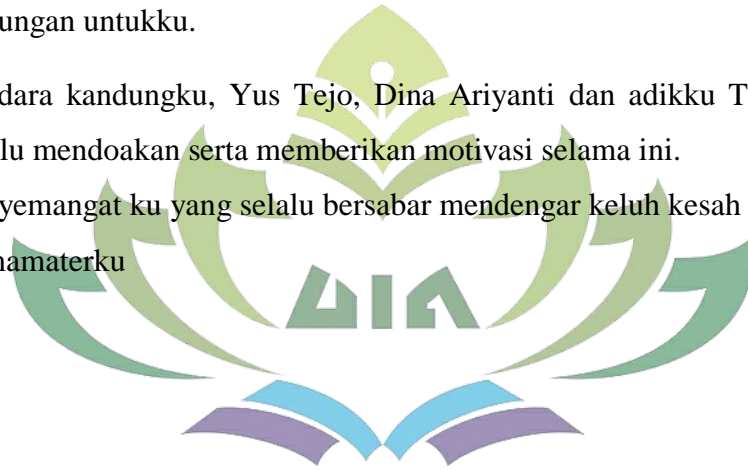
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (*Q.S Al Baqarah Ayat 267*)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena telah memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta dan sayang serta rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Jono Winarno dan Ibu Siti Rukiyah yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang dan kesabaran, senantiasa mendoakan dengan ikhlas, memberikan semangat serta dukungan untukku.
2. Saudara kandungku, Yus Tejo, Dina Ariyanti dan adikku Tomi Ifana yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi selama ini.
3. Penyemangat ku yang selalu bersabar mendengar keluh kesah ku Waliadin.
4. Almamaterku



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yesi Rahmawati, dilahirkan di Gunung Rejo 19 Juni 1996. Anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Jono Winarno dan Ibu Siti Rukiyah.

Riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Miftahul Huda, lulus pada tahun 2003.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Way Ratai, Pesawaran, lulus pada tahun 2009.
3. Madrasah Tsanawiyah (Mts) Al-Ikhlas Gunung Rejo, Way Ratai Pesawaran, lulus pada tahun 2012.
4. Madrasah Alliyah (MA) Al-Ikhlas Gunung Rejo, Way Ratai, Pesawaran, Jurusan IPS, lulus pada tahun 2015.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Perspektif Badan Wakaf Indonesia Tentang Hak Sewa Benda Bergerak Sebagai Objek Wakaf" (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Khoiruddin, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Muamalah.
3. Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I. Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Hj. Evi Sofwati, Lc., M. HI selaku Bendahara Badan Wakaf Indonesia yang telah memberikan informasi dan pengetahuannya guna penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak/Ibu guru TK, SD, MTs, dan MA yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.
7. Para staff karyawan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
8. Pimpinan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, serta referensi dan lain-lain.
9. Sahabat-sahabatku, Dwi Anista Febriyani, Siti Maesaroh, Putri Ayuni, Septiana Tri Lestari, Siti Maysaroh, Selvi Melani, Karlindasari, Cahya Surya Prawira dan Anjani Permata Sari yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan tentang kebaikan.
10. Sahabat-sahabatku di kost asrama najwa Deli Purnama Sari, Epi Apriyani dan Reni Arisandi yang selalu memberiku semangat serta menemani ku selama kuliah ini.
11. Teman-teman seperjuanganku yaitu seluruh mahasiswa dan mahasiswi muamalah angkatan 2015 khususnya muamalah kelas c.

12. Teman-teman KKN 24 Desa Margorejo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan Popi Markuri, Nova Sari, Miftahul Jannah, Tri Wahyu Ardiyansyah, Dilla Anisa, Ridho Fadilah dan kawan yang lain yang menemani ku selama 30 Hari. Serta teman-teman kulta dan teman-teman PPS.

13. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 21 April 2019

Yesi Rahmawati
NPM. 1521030441

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL. | i |
| ABSTRAK. | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN. | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN. | v |
| MOTTO. | vi |
| PERSEMBAHAN. | vii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP. | viii |
| KATA PENGANTAR. | ix |
| DAFTAR ISI. | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul. | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul. | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah. | 3 |
| D. Rumusan Masalah. | 7 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. | 8 |
| F. Metode Penelitian. | 8 |
| BAB II. LANDASAN TEORI | |
| A. Wakaf Dalam Hukum Islam | |
| 1. Pengertian Wakaf. | 14 |
| 2. Sejarah Wakaf. | 20 |
| 3. Dasar Hukum Wakaf. | 29 |
| 4. Jenis-Jenis Wakaf. | 33 |
| 5. Syarat dan Rukun Wakaf. | 37 |
| B. Pendapat Para Ulama Tentang Wakaf Hak Sewa. | 45 |
| C. Wakaf Menurut Peraturan Perundang- Undangan. | 47 |
| BAB III. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN | |
| A. Sejarah Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. | 53 |
| B. Landasan Hukum Badan Wakaf Indonesia provinsi Lampung. | 55 |
| C. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. | 56 |
| D. Pengelolaan Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. | 57 |
| E. Hak Sewa Benda Bergerak dalam Perspektif Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. | 60 |
| BAB IV. ANALISIS DATA | |
| A. Hak Sewa Benda Bergerak Sebagai Objek Wakaf Produktif. | 65 |
| B. Pandangan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung tentang | |

| | |
|---|----|
| Wakaf Hak Sewa Benda Bergerak..... | 69 |
| C. Benda bergerak yang di kelola oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. | 70 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut tentang proposal ini, terlebih dahulu akan di jelaskan pengertian judul. Untuk menghindari terjadi ke salah pemahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan di uraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul di dalam skripsi **Perspektif Badan Wakaf Indonesia Tentang Hak Sewa benda bergerak Sebagai Objek Wakaf**

1. Perspektif

Perspektif, yaitu sudut pandang ; pandangan setelah menyelidiki suatu permasalahan¹ yang ingin kita teliti benar tidaknya suatu masalah tersebut.

2. Badan Wakaf Indonesia

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan wakaf indonesia (BWI) merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.² Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.³

¹Departemen dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), h. 475.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 47.

³ Pasal 48.

3. Wakaf Hak Sewa Benda Bergerak

Hak Sewa adalah perjanjian untuk mengikatkan selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu⁴, dan benda bergerak adalah suatu benda yang dapat berpindah atau dipindahkan⁵. Jadi hak sewa benda bergerak adalah suatu benda yang disewakan atau diambil manfaatnya kepada orang lain dengan bayaran sebagai bayaran atau hasil dari sewa tersebut dan hasil dari sewa nanti akan dikembangkan untuk wakaf yang lebih produktif dan membantu masyarakat.

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Perspektif Badan Wakaf Indonesia Tentang Hak Sewa Benda Bergerak Sebagai Objek Wakaf.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang mendasari untuk membahas dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Badan wakaf Indonesia adalah lembaga yang menaungi wakaf dan mengatur berbagai macam wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang salah satunya adalah wakaf benda bergerak berupa hak sewa. Wakaf hak sewa sangat jarang dijumpai didalam masyarakat bahkan masih awam untuk masyarakat yang latar pendidikannya kurang. Dengan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2014), h. 345

⁵ *Ibid.*, h. 130

demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang objek wakaf berupa hak sewa.

2. Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai pandangan badan wakaf Indonesia mengenai wakaf hak sewa yang ada dalam Pasal 16 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

C. Latar Belakang

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT. Untuk merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, harus ada kerja sama dan tolong menolong. Persaudaraan dan perlakuan merupakan suatu konsep yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi. Dengan begitu, dimungkinkan setiap orang memiliki akses dan hak yang sama atas sumbangannya terhadap masyarakat.⁶

Dalam komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan adalah bertentangan dengan Islam. Tetapi, konsep keadilan Islam dalam distribusi

⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2005), h. 122

pendapatan dan kekayaan, serta kosepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat.

Adanya perbedaan dalam kemampuan serta perbedaan dalam kesempatan dapat diduga sebab musabab dari perbedaan dalam rezeki yang yang mungkin diterima seseorang. Dalam ajaran Islam ada beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan sebagian harta seseorang bagi kepentingan sosial. Salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut adalah wakaf.⁷

Praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf.

Keberadaan wakaf sangat dianjurkan dalam agama Islam, dimana setiap orang diperintahkan untuk dapat menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk dibelanjakan di jalan Allah. Para ahli dan para ulama memiliki perbedaan dalam memaknai kata wakaf. Secara garis besar, makna wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Pemberian berupa hak milik dimana pemanfaatannya untuk kepentingan umum demi mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka hal ini dikategorikan sebagai wakaf sebagaimana Allah SWT bermirman :

⁷*Ibid.*, h. 123

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S Al- Baqarah : 267)⁸

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak yaitu wakaf. selain itu diterangkan dalam hadis Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda “bila manusia mati maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah (yang berterusan), ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang mendoakan kepadanya (HR. Muslim no. 1631).

⁸ Al-Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 267

Sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadis diatas tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap sedang manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus-menerus hingga *waqif* (pelaku wakaf) tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal.

Pada dasarnya, wakaf merupakan tindakan sukarela (tabarru') untuk mendermakan sebagian kekayaan karna sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal. Maka derma wakaf itu bernilai Jariyah.⁹

Keberadaan wakaf sangat penting dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan Islam, dan sudah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganggap wakaf sangat penunjang perkembangan masyarakat baik di bidang sosial, pendidikan maupun ekonomi.¹⁰

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah salah satu lembaga wakaf yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menaungi masalah wakaf baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Lembaga ini sangat membantu dalam hal perwakafan dari akad-akad wakaf, cara pengelolaan benda wakaf hingga perselisihan yang mungkin terjadi. BWI hadir untuk membina *nazhir* (pengelola aset wakaf) agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), h. 438

¹⁰Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1988), h.79

Kebiasaan Masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, panti asuhan dan lain sebagainya. Dalam perkembangan zaman dilihat dari kekekalan fungsi dan manfaat dari harta tersebut, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dapat diwakafkan. Barang bergerak yang dapat diwakafkan, seperti uang, surat berharga, kendaraan baik mobil atau pun motor. Benda bergerak seperti kendaraan dapat dikembangkan dengan cara menyewakannya. Dimana benda wakaf atau benda bergerak yang diwakafkan dikelola dengan disewakan dan penyewa membayar harga sewa tersebut. Hasil dari sewa benda bergerak akan dikelola kembali oleh BWI atau *Nazhir* yang akan diberikan untuk membantu mengembangkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan ini perlu di tela'ah dan mempelajari lebih lanjut agar menambah pengetahuan dibidang perwakafan dengan meneliti terhadap Perspektif Badan Wakaf Indonesia Tentang Hak Sewa Benda Bergerak Sebagai Objek Wakaf.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah hak sewa dapat menjadi objek wakaf yang produktif ?
2. Bagaimana pandangan Badan Wakaf Indonesia tentang Hak Sewa benda bergerak sebagai objek Wakaf ?
3. Benda bergerak apa saja yang di kelola oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah hak sewa dapat menjadi objek wakaf yang produktif.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Badan Wakaf Indonesia tentang Hak Sewa sebagai Wakaf.
- c. Untuk mengetahui bend bergerak apa saja yang di kelola oleh Bada Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

2. Kegunaan penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu dan media pembeding dalam keilmuan dibidang Muamalah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal perwakafan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam mempraktekan ilmupengetahuanyang telah didapatkan selama belajar di FakultasSyari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau

diresponden.¹¹ Yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber data penelitian

Sumber data yaitu semua sumber data atau keterangan yang diperoleh dari responden yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian ini. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

¹¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan juga organisasi.¹² Pada data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini karena beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yaitu Bendahara Badan Wakaf Indonesia Ibu Evi Sofwati .

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung yang beralamatkan Jl. Cut Mutia No 27,

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.29.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.

Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214, yaitu berjumlah 11 orang Pengurus Lembaga Tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Badan Wakaf Indonesia sebagai sampel karena sudah ditentukan siapa yang akan diteliti pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung, baik Ketua, Sekertaris, Bedahara maupun staf Badan Wakaf Indonesia yang lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁵ Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan wawancara.

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.¹⁶ Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari ketua BWI, Sekertaris BWI, Bendahara BWI serta seluruh anggota BWI yang dianggap mengetahui tentang permasalahan penelitian ini.

¹⁴*Ibid.*, h. 119

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h..224.

¹⁶*Ibid.*, h.188.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁷ Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap

¹⁷Nasution, *Metode Penelitian Riserch. (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h.122.

permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.¹⁸

Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹⁹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang wakaf hak sewa kemudian menyimpulkannya dengan wakaf dalam perspektif badan wakaf Indonesia.

¹⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.181.

¹⁹ *Ibid.*, h.182.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf Dalam Hukum Islam

1. Pengetian Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau diam ditempat atau tetap berdiri¹. Wakaf adalah kegiatan menahan harta untuk kepentingan masyarakat dan mencari keridhaan Allah SWT.

Dalam peristilahan Syara’ secara Umum, wakaf ialah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan asal berarti menahan agar barang tersebut tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dan disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya ialah menggunakan sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.²

Di dalam kepustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Kedua-duanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan, menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Bentuk jamaknya adalah *awqaf* untuk *waqf* dan *ahbas* untuk *habs*. Perkataan *habs*

¹ *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan wakaf dan Ditjen Bimas Islam, Departemen Agama RI, 2007), h. 1

² *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, 2007), h. 12

atau *ahbas* biasanya di pergunakan di Afrika Utara di kalangan pengikut mazhab Maliki.³

Istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil dan tanpa mengkonsumsi harta benda tersebut. Dalam hal ini harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴

Benda bergerak menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, yaitu benda yang dapat dimanfaatkan kembali dan dapat dipindah atau berpindah tangan. meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁵

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1988), h. 80

⁴ Dahlia Haliah Ma'u, "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang *Ibdal* dan *Istibdal* Benda Wakaf", *Jurnal Al Adalah*, VOL 13 No 1 2016, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h 54. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1129/930> (17 Januari 2019 Pukul 20:15 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁵ *Ibid.* *Jurnal Al- 'Adalah*, VOL 13 No 1 2016, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h 54. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1129/930> (17 Januari 2019 Pukul 20:15 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah..

Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan para ulama fikih terjadi perbedaan pendapat.⁶ Abu Hanifah merumuskan definisi wakaf dengan : “Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan”.⁷ Berdasarkan definisi ini, Abu Hanifah menyatakan bahwa akad wakaf bersifat tidak mengikat (*ghairu lazim*) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan *waqif* secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan : (1) apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, (2) peruntukan wakaf adalah untuk masjid, (3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian *waqif*.

Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya (wakaf tidak mempunyai hukum mengikat) pada dua dalil :

- a. Sabda Nabi Muhammad Saw,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَبْنَ عَنْ فَرَضَائِي (رواه البيهقي)⁸

Artinya :

“Dari Ibn Abbas berkata : Rosulullah Saw bersabda : *tidak boleh ada penghalang atas ketentuan-ketentuan Allah* (bagian-bagian waris yang ditentukan Allah” (HR al-Baihaqi).

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 309

⁷ Badran Abu al-Ainaini, *Ahkam al- Washy wa Auqaf*, (Iskandariyah : Muassasat as-Salaby, t t), h. 20

⁸ Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *sunan al-kubra*, (India : Dar al- Ma’rif al-Usmaniyah, 1352 H), Juz 6, h. 162

Kalau kiranya wakaf adalah mengeluarkan harta yang diwakafkan, ini adalah penghalang ketentuan Allah. Sebab, ia menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagian mereka yang telah ditentukan.

Namun, meskipun hadist ini dhaif, ia yang dimaksud oleh hadist tersebut adalah menganggap batal (tidak benar) tradisi jahiliyah, karena membatasi pewaris hanya pada ahli waris laki-laki yang dewasa bukan ahli waris perempuan dan anak-anak kecil.⁹

- b. Hadist yang diriwayatkan dari al-Qadhi Syuraih, dia berkata, “*Nabi Muhammad Saw datang untuk menjual barang wakaf*”

Jika Rasulullah melakukan hal itu, kita tidak boleh membuat-buat wakaf dalam bentuk lain. Sebab, wakaf adalah menahan barang dan ini disyariatkan.

Namun, keterangan ini juga tidak menunjukkan apa yang dikehendaki Imam Abu Hanifah. Sebab, wakaf (penahanan) yang dilarang adalah penahanan harta untuk berhala dan arca. Rasulullah menjual, menghukumi wakaf tersebut batal adalah untuk menghilangkan paganisme. Sedangkan, wakaf adalah sistem Islam murni. Imam as-Syafi'i berkata, “sejauh yang aku tahu, orang-orang jahiliyah tidak mempraktikkan wakaf. Hanya umat Islam saja yang mempraktikkan wakaf.”

Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf dengan : “*wakaf adalah si waqif menjadikan hasil dari harta yang dimiliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, seperti dirham (uang), untuk orang-orang yang berhak dengan sighat tertentu dalam jangka*

⁹ Wahbah al- Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 270

*waktu tertentu sesuai dengan kehendak waqif*¹⁰. Hampir sama dengan pendapat Abu Hanifah, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan *waqif* dari harta yang diwakafkannya, hanya saja *waqif* melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasil untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu.

Wakaf menurut Malikiyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolannya. Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan pada hadis Umar, Rasulullah Saw. Bersabda kepadanya, *“jika kau ingin, kau bisa menyedekahkan hasilnya”*. Dalam hadis ini ada indikasi sedekah dengan hasil tanah tersebut. Sementara, kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan dan larangan segala bentuk pengelolaan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain, dengan dalil pemahaman Umar terhadap sabda Nabi, *“Dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan”*.

Sementara itu, mayoritas ulama kalangan Syafi'iyah, Hambali, dan Hanafiyah mendefinisikan wakaf dengan *“menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala”*¹¹.

Dari definisi ini, jumhur ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat (*lazim*). Dalam pengertian, *waqif* tidak dapat menarik kembali harta yang telah

¹⁰ Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 272

¹¹ *Ibid.*, h. 271

diwakafkan, tidak dapat menjual ataupun mewariskannya. Menurut mayoritas ulama, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *waqif* dan berpindah menjadi milik Allah yang di pergunakan untuk kebaikan umat Islam.

Wakaf menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan serta disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (penggolongan) dalam penjagaannya atau *mushrif* (pengelolaan) yang dibolehkan adanya.¹²

Ada beberapa pendapat dari para ahli, menurut Moh. Anwar yang di maksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang daripada dijual belikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.¹³

Menurut Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie Van den Islam* memberi batasan, yang dimaksud dengan wakaf adalan penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.¹⁴

Sedangkan menurut Naziroedin Rachmat dalam bukunya *Harta Wakaf*, memberi pengertian wakaf adalah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan

¹² Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), h. 239

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.

¹⁴ *Ibid.*, h. 52

bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan syariat.¹⁵

Dengan demikian, yang dimaksud dengan wakaf ialah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum.

2. Sejarah Wakaf

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan perkembangan Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid yang dibangun diatas tanah wakaf.¹⁶

a. Perwakafan Zaman Nabi Muhammad Saw

Sejarah perwakafan dalam Islam bersamaan dengan periode kerasulan Nabi Saw, ketika berada di Madinah. Perwakafan zaman Nabi dapat diketahui melalui sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Keduanya merupakan saksi sejarah yang tidak dapat terbantahkan keabsahannya. Jika terjadi perselisihan pendapat di kalangan umat Islam, maka harus kembali kepada keduanya sebagai bentuk dasar yang orisinil, sekaligus sebagai hujjah syar'iyah.¹⁷

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah.

Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi

¹⁵ *Ibid.*, h. 52

¹⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 236

¹⁷ *Dinamika Perwakafan : di Indonesia dan berbagai belahan Dunia*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015), h. 25

Islam (*fuqaha*”) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin.

Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi, dan sebagian keuntungannya tidak lagi diberikan kepada mereka. Ketika Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada Al-

Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Baitul Mal.

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah.

Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian diantara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *ahli*).

Sahabat Usman bin Affan juga mewakafkan sumur yang airnya digunakan untuk member minum kaum Muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunah bagi para

sahabat. Beliau bersabda, “*Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah mengampuni dosa-dosanya*” (HR. An-Nasa’i). dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum Muslimin Selain itu, Abu Thalhah juga mewakafkan perkebunan Bairuha’, padahal perkebunan itu adalah harta yang palinh dicintainya. Maka turunlah Ayat yang berbunyi.

Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu keluarga dan keturunannya. Maka Abu Thalhah mengikuti perintah Rasulullah tersebut, dan diantara keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Thalhah adalah Hassan bin Tsabit. Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Ibn Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq.

Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Dengan mengambil dalil pada QS Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut

pajak bumi. Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, terlebih lagi dalam perkembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin.

Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada diberbagai Negara Islam seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan kompleks pertokoan diberbagai ibu kota Negara Islam yang terbentang dari ujung Barat di Maroko hingga ke ujung Timur di New Delhi dan Lahore.

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin

saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.

b. Perwakafan era dinasti Islam

Perwakafan pada era dinasti Bani Umayyah telah mengalami dinamika. Sebab, periode ini merupakan transmisi (*ittisal*) dari periode sahabat, dimana gerakan wakaf tetap berlangsung seperti pembebasan (*futuhat*) pada wilayah-wilayah Mesir, Syam dan lainnya. Abu Zahrah beranggapan bahwa wakaf telah dipraktikkan pada zaman kerajaan Bani Umayyah di Mesir dan Syam dan sebagian daerah-daerah penaklukan Islam. Adapun jenis wakafnya adalah wakaf tanah, bangunan dan kebun-kebun. Untuk mengembangkan perwakafan, mereka telah membentuk pengurus wakaf secara resmi, sebagaimana dilakukan oleh khalifah Hisyam ibn Abd al-Malik yang telah mengukuhkan jabatan khusus bagi pengurus harta wakaf.

Tidak kalah berkembangnya, perwakafan pada era Abbasiyah, dimana harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di *Bait al-Mal*, tetapi dikelola oleh seorang hakim yang selalu dimonitoring yang dibentuk *Bait al-Mal al-Khusus*. Pada periode *Mamluk*, harta wakaf dibagi menjadi tiga kategori (1) *Awqaf abbas* terdiri atas tanah-tanah perkebunan yang luas di Mesir untuk pembiayaan masjid; (2) *Awqaf Hukmiyyah* yang terdiri atas tanah-tanah diperkotaan Mesir dan Kairo yang digunakan untuk kepentingan dua kota suci tersebut; dan (3) *Awqaf Ahliyah* yang diatur secara terpisah.

Praktik wakaf menjadi luas pada masa Dinasti Umayyah dan pada masa Dinasti Abbasiyah telah berkembang begitu rupa, semua orang berduyung-duyung untuk melaksanakan wakaf. Adapun bentuk perkembangannya adalah objek wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk pembangunan lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para staf, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Respon positif masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat begitu pula pada masa Dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut "*shadr al-wuquf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang sesuai dengan pengaturan administrasi pemerintah.

Perkembangan wakaf tidak hanya berupa perekonomian semata tetapi telah masuk dalam ranah pendidikan dan dilakukan oleh negara. Misalnya, Shalahuddin al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk mengembangkan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah, dan madrasah mazhab al-Hanafiyyah dengan dana melalui model atau sistem mewakafkan kebun dan lahan pertanian. Seperti pembangunan madrasah mazhab syafi'iyah disamping makam

imam syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau *al-fil*. Dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab sunni, Shalahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa bagi orang Kristen pendatang dari Iskandariyah untuk berdagang di Kairo wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan pada para ahli fiqh dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubi untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu Mazhab Sunni. Dalam mempertahankan kekuasaannya, harta milik negara (*bayt al-ma*) menjadi modal untuk diwakafkan demi perkembangan mazhab sunni dan menggusur Mazhab Syi'ah, yaitu dinasti Fathimiyah.

Selanjutnya, perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan variatif. Akibatnya segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Bentuk wakafnya adalah tanah pertanian dan pembangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan, dan tempat belajar. Bahkan, hamba sahaya diwakafkan untuk merawat lembaga agama, seperti wakaf budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Usmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid. Singkatnya, pada masa dinasti Mamluk wakaf telah menjadi tulang punggung ekonomi.

c. Perwakafan di Indonesia

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia, pada umumnya tanah milik, erat sekali hubungannya dengan

pembangunan. Semakin meningkat pembangunan di Indonesia, maka kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan prasarana umum menjadi meningkat pula. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah wakaf secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkannya.

Praktik wakaf sudah ada sejak kerajaan Islam berkuasa yang menjadi kekuatan politik Islam pada akhir abad ke-12 M. Tradisi yang mirip dengan wakaf di Jawa Timur telah berlaku kira-kira abad ke-15. Hal ini dapat ditelusuri dari peran walisongo yang memperkenalkan Islam. Mereka menyebar Islam pada lingkungan istana dengan cara mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan (istana). Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan Sunan Ampel, kemudian jejak mereka diikuti oleh walisongo yang lain. Masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam dan juga sebagai institusi pertama bagi perkembangan wakaf pada masa berikutnya.

Pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, wakaf merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Fenomena ini muncul karena banyak kerajaan Islam yang memerintah di nusantara ini. Diantaranya adalah kerajaan Demak Kerajaan Samudera Pasai, dan kerajaan Mataram. Hal ini kemudian menjadikan wakaf sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan dinyatakan masih

berlaku kecuali jika ada aturan baru. Tentu, hal ini logis sesuai dengan pasal peralihan Undang-Undang Dasar 1955. Dalam masalah wakaf, Departemen Agama telah mengeluarkan petunjuk mengenai wakaf. Pada tanggal 22 Desember 1953. Dengan demikian, perwakafan dijadikan salah satu wewenang dari jabatan Urusan Agama, yakni bagian ibadah sosial.

3. Dasar Hukum Wakaf

a. Al- Qur'an

1) Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al- Baqarah : 267)¹⁸

2) Al Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁸Al-Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 267

Artinya :

dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.(Q.S Al-Hajj : 77)¹⁹

3) Al- Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Q.S Al- Imran :92)²⁰

Pada Ayat-ayat diatas menganjurkan pada kita untuk selalu berbuat baik dengan menafkahkan hasil usaha kita dengan berbagi kepada sesama dan kepada yang lebih membutuhkan. Karna sesungguhnya nikmat rezeki yang kita dapat dari hasil di bumi ini terdapat hak orang lain yang harus kita berikan dengan jalan Allah SWT. Baik dengan cara bersedekah atau pun dengan mewakafkan sebagian harta yang kita punya.

b. Hadist

Pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambilkan dari beberapa hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

¹⁹ Al-Qur'an Surat Al- Hajj Ayat 77

²⁰ Al-Qur'an Surat Al- Imran Ayat 92

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)²¹

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda “bila manusia mati maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah (yang berterusan), ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang mendoaka kepadanya” (HR. Muslim Nomor. 1631).

Penafsiran sadaqah jariyah dalam hadis ini dikatakan masuk dalam pembahasan masalah wakaf. Seperti yang diungkapkan seorang Imam :

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لَا تَنْهَى فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ²²

Artinya :

Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para Ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt., 87).

Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang dengan memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk sementara untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *waqif*. Dalam hadis lain diceritakan :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُؤْتُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ

²¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia : Maktabat Dahlan, T,Th), h. 1631

²² *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Op. Cit.*, h. 25

23 مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Artinya :

“Diriwayatkan oleh Ibn Umar, Sesungguhnya Umar bin khatab mendapat tanah di Khabiar, kemudian ia mendatangi Nabi Saw. Untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh tanah di Khabiar, namun aku tidak menginginkannya, apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini ?” Nabi menjawab : Jika kamu menghendaki tanahlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, ibn sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri” (HR. Muslim)

Sebagian besar ulama salaf dan ulama-ulama sesudah mereka berpendapat tentang keabsahan wakaf. Wakaf Umar seratus bagian dari peperangan Khaibar adalah wakaf pertama dalam Islam menurut pendapat yang masyhur. Jabir berkata, *“tidak seorang pun dari sahabat Rosul yang mempunyai sedikit harta kecuali diwakafkan”*.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا نَزَلَتْ سَهْمٌ لِي لِي خَيْرٌ لَمْ أَصِبْ

مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِحْسِنْ

أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya :

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi Saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya, Nabi Saw mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan atau wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhori dan Muslim)

²³ Imam Muslim, *Op.Cit.*, h. 1223

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis, yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasar kedua sumber tersebut, sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan hadis yang sedikit itu dapat menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyyah yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.²⁴

4. Jenis- Jenis Wakaf

Pada umumnya wakaf ada beberapa jenis, yaitu:

a) *Wakaf Ahli* (keluarga)²⁵

Adalah wakaf yang ditunjukan kepada orang- orang tertentu seseorang atau lebih, keluarga si waqif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut *Wakaf Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan berhak

²⁴ *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, Op.Cit., h. 26-27*

²⁵ *Fiqh Wakaf, Op.Cit., h. 14*

mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diujung hadits tersebut dinyatakan: “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk keluarga dan anak pamannya”

Wakaf ahli atau wakaf khusus adalah wakaf yang menjadi milik penerimanya, maksudnya orang-orang yang berhak mengelola dan menikmati hasilnya. Termasuk kedalam kategori ini adalah wakaf untuk anak keturunan, wakaf kepada para ulama dan fakir miskin, wakaf barang tidak bergerak untuk keperluan masjid, kuburan, madrasah dan lain sebagainya. Wakaf jenis inilah yang diperselisihkan kebolehan menjual oleh para ulama mazhab, manakala ada alasan-alasan untuk menjualnya, atau tidak boleh menjualnya sungguhpun terdapat seribu alasan untuk itu.²⁶

b) *Wakaf Khairi* (Umum)

Wakaf Khairi Adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Wakaf ini ditunjukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera Basritama : 2004), h. 671

aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatas pihak- pihak yang ingin mengambil manfaat. Dalam wakaf ini juga si *waqif* dapat mengambil manfaat dari harta yang dikafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *waqif* boleh saja sholat atau beribadah yang lain disana.²⁷

Wakaf umum yaitu wakaf yang dikehendaki oleh perwakafannya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yakni semua orang, tidak hanya sekelompok orang atau lapisan masyarakat tertentu saja. Contohnya adalah madrasah, rumah sakit, masjid, kuburan, jembatan, penginapan yang sudah ada sejak semula, mata air, pohon-pohon, rindang tempat peristirahatan pejalan kaki. Termasuk dalam kategori ini adalah masjid, kuburan, dan makam pahlawan, sebab harta wakaf tersebut tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan suatu kaum muslimin, tidak yang lainnya, atau bagi sekelompok kaum muslimin tertentu dan tidak kelompok lainnya.²⁸

Jenis benda wakaf khairi atau umum terdapat beberapa bentuk baik dari jenis benda wakaf, jangka waktu wakaf dan juga tujuan penggunaan wakaf.

1. Jenis benda wakaf, meliputi:

- a. Benda tidak bergerak, Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun

²⁷ *Fiqh Wakaf*, Op.Cit., h. 16

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, Op.Cit., h. 671

2004 Pasal 2 Ayat (2) Tentang Wakaf, dijelaskan bahwa benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan sebagai berikut :²⁹

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas tanah satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Benda bergerak, Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (3) tentang Wakaf, benda bergerak adalah benda bergerak yang tidak habis dikonsumsi, meliputi :³⁰

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

²⁹ UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 16 Ayat (2)

³⁰ UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 16 Ayat (3)

2. Jangka Waktu Wakaf, meliputi: ³¹

- 1) *Muabbad*, yaitu wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi atau muabbad, yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Pahala wakaf ini mengalir untuk waqif selama wakafnya terus belangsung. Wakaf ini disebut sadaqah jariyah yang paling sempurna bentuknya.
- 2) *Mu'aqqot*, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu atau tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan waqif sendiri.

3. Tujuan penggunaan wakaf ³², meliputi:

- 1) *Wakaf Langsung* yaitu wakaf yang pokok barangnya untuk mencapai tujuannya dengan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit).
- 2) *Wakaf Produktif* yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.

5. Syarat Dan Rukun Wakaf

Rukun adalah suatu perkara tidak sah sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian perkara itu atau tidak. Sedangkan Rukun Wakaf adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan

³¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2004), h. 24-25

³² *Ibid.*, h. 162

syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4, yaitu :

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan harta)

Dalam Pasal 215 KHI dan Pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 1977 disebutkan, *waqif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya dengan syarat-syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 217 KHI : *Badan-badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa, dan orang yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*

Ada beberapa syarat seorang dapat mewakafkan hartanya, meliputi :

- a) Merdeka, wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.
- b) Berakal sehat, Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, tidak mumayyiz dan tidak cakap untuk melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga dengan wakaf yang dilakukan oleh orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.
- c) Dewasa (baligh), Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena dipandang tidak cakap melakukan akad.
- d) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai), Orang yang berada

dibawah pengampuan di pandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang di lakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukum wakafnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2. *Mauquf* (barang atau harta yang diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan benda wakaf. Namun, mereka sepakat dam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut Syariat (*mal mutaqawwim*), jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna *waqif*. Ada beberapa pendapat para ulama tertang persyaratan benda wakaf, yaitu :

Ulama Hanafiyah mensyaratkan harta wakaf yaitu :

- 1) Benda wakaf, adalah sesuatu yang dianggap harta yang boleh dimanfaatkan secara syar'i (*mal mutaqawwim*) dan merupakan benda tidak bergerak, tidak sah mewakafkan sesuatu berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan misalnya *hak irtifaq* karena hak menurut Hanafiyah tidak termasuk harta.

Syahid Sabiq menyatakan tidak sah mewakafkan benda yang bisa lenyap atau habis dengan proses pemanfaatan, seperti uang, lilin, makanan dan minuman maupun harum-haruman. Disamping itu juga tidak dibolehkan benda yang tidak boleh diperjual belikan, seperti

marhun (barang jaminan), anjing, babi dan binatang buas lainnya.³³

Begitu juga menurut Hanafiyah tidak sah mewakafkan benda bergerak, karena *ta'bid* (kekal) merupakan syarat bolehnya wakaf, sedangkan barang bergerak tidak bersifat kekal atau cepat musnah.³⁴ Kecuali benda bergerak itu mengikuti pada benda tidak bergerak. Namun, ulama ini berdasarkan *istihsan* membolehkan mewakafkan benda yang telah berlaku menurut kebiasaan, seperti wakaf buku dan wakaf alat-alat penyelenggaraan jenazah.

Jalaludin al-Mahally membolehkan mewakafkan benda tidak bergerak seperti tanah dan benda bergerak yang dibolehkan memanfaatkan.³⁵

- 2) Benda wakaf itu diketahui, jelas ukurannya dan tempatnya, seperti mewakafkan 1.000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas.
- 3) Benda wakaf merupakan milik sempurna dari waqif karena wakaf menggugurkan kepemilikan.

Ulama Malikiyah mensyaratkan benda wakaf adalah benda milik yang tidak terkait dengan hak orang lain. Maka tidak sah mewakafkan benda yang dijadikan jaminan (*marhun*), benda yang disewakan. Harta wakaf itu terpisah apabila harta itu harta yang tidak dapat dibagi. Kepemilikan menurut ulama ini mencakup kepemilikan secara materi maupun manfaatnya, sehingga mereka membolehkan mewakafkan

³³ Syahid Sabid *Op.Cit.*, h. 328

³⁴ Wahbah az- Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 279

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada : 2016), h. 315

manfaat hewan untuk dimanfaatkan tenaga maupun untuk dikendarai, boleh mewakafkan makanan dan uang dan benda tidak bergerak lainnya.

- 4) Harta wakaf itu harta yang terpisah, tidak mengikuti pada yang lain apabila harta itu harta yang dapat dibagi dan dapat diserahkan.

Dikalangan mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan benda wakaf itu jelas, tidak berada dalam tanggungan, benda wakaf itu merupakan benda milik dari *waqif* yang dapat diserahkan, benda wakaf itu dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat, dan pemanfaatan benda itu berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan benda itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan, minuman maka wakafnya tidak sah, karena benda ini akan habis karena pemanfaatannya. Begitu juga tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat, seperti anjing dan babi. Menurut mereka mewakafkan benda bergerak, seperti kuda untuk dikendarai, peralatan perang untuk tentara yang sedang berjihad, air, dan cat untuk memakmurkan masjid, mushaf, buku dan sejenisnya, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan rumah boleh dilakukan. Namun, dikalangan ulama ini tidak sah mewakafkan dinar dan dirham untuk perhiasan.³⁶

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat benda wakaf adalah :

- a) *Mal Mutaqawwim* (benda yang boleh memanfaatkannya menurut syariat) tanpa membedakan benda bergerak, seperti uang, buku,

³⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 280

binatang ternak, buku, dan benda bergerak lainnya kemudian tidak bergerak, seperti tanah, rumah, tanaman dengan ketentuan benda tersebut merupakan benda yang tahan dalam proses pemanfaatan.

- b) Jelas dan diketahui ukuran jenis, dan tempatnya.
- c) Benda dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- d) Merupakan benda milik yang sempurna dari *waqif* yang bebas segala hak-hak orang lain.

Dalam KHI, Pasal 215 angka 4 dinyatakan, benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut agama Islam. Aturan ini memberi peluang untuk melakukan wakaf uang karena benda wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga dibolehkan terhadap benda bergerak. Peluang ini dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam Pasal 16 dinyatakan :*benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun diatas tanah milik. Kemudian, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai tengan ketentuan syariah dan perundang-undangan.*

3. *Mauquf Alaih* (penerima wakaf atau tujuan wakaf)

Mauquf Alaih yaitu pihak yang menerima manfaat dari pengelola wakaf. Apabila orang menerima manfaat itu adalah orang yang sudah ditemukan namanya (khusus) maka syaratnya adalah mereka yang sah menerima kepemilikan, misalnya yang menerima manfaat wakaf itu sah menerima kepemilikan. Begitu juga, tidak sah kepada orang yang sudah meninggal atau kepada bangunan.³⁷

Mauquf alaih disyaratkan wakaf adalah untuk kebaikan, *taqarub ila Allah* atau untuk keluarga.³⁸ *Waqif* dalam mewakafkan hartanya harus menentukantujuan wakaf baik untuk kepentingan khusus seperti meNomorlong keluarganya sendiri, fakir miskin, sabilillah, dan ibn sabil ataupun untuk kepentingan umum, seperti untuk ibadah, pendidikan, dan sosial lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 22 dinyatakan : *Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya dapat diperuntukan untuk memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan atau tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan.*³⁹ Tujuan wakaf ini dinyatakan oleh *waqif* ketika melafalkan ikrar wakaf.

4. *Shighat* wakaf (ikrar wakaf)

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari *waqif* untuk

³⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1988), h. 86

³⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 277

³⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22.

mewakafkan tanah benda miliknya.⁴⁰ Syarat-syarat shighat wakaf adalah
 .⁴¹

- 1) Shighat wakaf harus bersifat *ta'bit* (selama-lamanya). Menurut jumhur ulama selain Malikiyah menyatakan wakaf tidak sah apabila ditentukan waktunya. Misalnya, mewakafkan benda selama 5 Tahun atau 10 Tahun, wakaf itu batal. Karena tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, maka wakaf itu harus bersifat selamanya (abadi).
- 2) Shighat bersifat *tanjiz*. Artinya wakaf tidak diiringi dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, demikian menurut jumhur ulama. Namun, ulama Malikiyah menyatakan wakaf boleh saja dikaitkan dengan syarat, seperti ungkapan seseorang “jika kamu berhasil mengambil rumahku yang di kuasai si fulan maka rumah itu aku wakafkan kepadamu”.
- 3) *Iltizam*, wakaf menurut jumhur ulama bersifat mengikat. *Waqif* tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkannya.
- 4) Shighat tidak diiringi syarat yang batal, syarat yang bertentangan dengan tabiat wakaf, misalnya diungkapkan “saya wakafkan tanah ini dengan syarat ini tetap milik saya”.
- 5) Menyebutkan *mauquf alaih* secara jelas dalam *shighat wakaf*.
- 6) Shighat dinyatakan dengan *lafal sharih* (jelas), seperti dengan *lafal kinayah* (sindiran), seperti sadaqah (yang diniatkan wakaf).

Shighat atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif

⁴⁰ Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1

⁴¹ Wahbah az- Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 312

(sepihak) maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya *qabul* (pernyataan menerima dari penerimaan wakaf).

B. Pendapat Para Ulama Tentang Wakaf Hak Sewa

Kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa orang yang menyewakan tidak bisa mewakafkan hasil dari barang yang disewa. Sebab, menurut mereka wakaf disyaratkan untuk selamanya, sedangkan akad sewa-menyewa tidak untuk selamanya.⁴² Dalam mazhab Hanafi dikenal dengan sebuah kaidah : “Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini ialah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf, yaitu ta’bah (tahan lama). Sebab itu, mazhab Hanafi memperoleh wakaf benda bergerak sebagaimana pengecualian prinsip.

Benda jenis ini sah jika memenuhi beberapa hal : *pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam : (1) barang tersebut mempunyai dengan sifat diam di tempat dan tetap. Misalnya, bangunan dan pohon. Menurut Mazhab Hanafiyyah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak. (2) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak, kerbau, yang dipergunakan bekerja dan lain- lain. *Kedua*, kebolehan harta bergerak itu berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah mewakafkan senjatanya untuk berperang di jalan Allah SWT. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan seperti wakaf kitab- kitab dan mushaf.

⁴² Wahbah az- Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 282

Menurut Ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash. Wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku- buku dan mushaf dimana yang diambil sama dengan yang diambil pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang). Ulama Hanafiyah juga membolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah bisa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak sebagai alat manusia kerja.

Kalangan Syafi'iyah juga mengatakan bahwa orang yang memiliki hak manfaat suatu barang selain budak seperti orang yang menyewa, orang yang diberi wasiat mendapatkan hasil barang, wakaf mereka tidak sah. Namun, jika orang yang menyewakan mewakafkan bangunan atau tanaman yang ada ditanah yang dia sewa, pendapat yang paling shahih adalah boleh. Keberlangsungan wakaf cukup terjadi sampai pemilik tanah melepasnya setelah masa tempo sewa menyewa selesai. Orang yang meminjam dan orang yang diberi wasiat hasil barangnya menurut hukum adalah sama sebagaimana orang yang menyewakan. Menurut mereka, orang yang menyewakan boleh mewakafkan tanah yang disewakan.⁴³ Menurut madzhab ini bahwa, barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

Kalangan Malikiyyah mengatakan bahwa orang yang menyewakan berhak mewakafkan hasil dari sewaan dalam tempo penyewaan yang ditentukan. Sebab menurut mereka, keabadian wakaf tidak disyaratkan. Wakaf sah untuk tempo

⁴³ Wahbah az- Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 282-283

tertentu. Orang yang menyewakan tidak boleh mewakafkan barang yang disewakan.⁴⁴ Madzhab Maliki berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang membolehkannya atau tidak, karena madzhab ini tidak mensyaratkan ta'bid (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan mereka membolehkan atau menganggap sah meskipun sementara.

Kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah membolehkan orang yang menyewakannya mewakafkan barang yang disewakan. Sebab, itu adalah wakaf barang yang dia miliki, orang yang menyewa masih mempunyai hak untuk memanfaatkan barang yang disewakan sampai akhir masa penyewaan, atau meminta keikhlasan orang yang menyewa untuk memfasakh (membatalkan) akad sewa-menyewa sebelum selesai masanya.

Kesimpulannya, menurut mayoritas ulama orang yang menyewakan boleh mewakafkan barang yang disewakan. Sedangkan menurut Malikiyyah tidak sah. Sebaliknya, menurut malikiyyah orang yang menyewa boleh mewakafkan hasil dari barang yang disewa, sedangkan menurut mayoritas ulama tidak sah.⁴⁵

C. Wakaf Menurut Perundang- Undangan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
3. PP Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴⁴*Ibid.*, h. 283

⁴⁵*Ibid.*, h. 283

4. Permenag Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Bergerak Wakaf Bergerak Berupa Uang.
9. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.
10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Wakaf uang merupakan perkembangan benda wakaf yang produktif, karena bisa langsung diberikan kepada masyarakat baik langsung bentuk uang dan juga barang. Wakaf uang ini juga dapat dikelola dengan di investasikan ke bank syariah dan hasil investasi tersebut diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Banyak para ulama yang memperdebatkan tentang diadakannya wakaf uang ini. Namun pada dasarnya ulama ingin mempertahankan manfaat dari benda yang akan diwakafkan agar selalu bertahan lama. Berdasarkan hal itu, wakaf uang dibolehkan selama terjaganya keutuhan manfaat dari wakaf uang itu sendiri. Cara menjaga wakaf uang itu sendiri bisa dengan diinvestasikan dengan sistem bagi hasil atau *mudharabah* atau juga dengan sistem lainnya. Melalui investasi, nilai uang yang diwakafkan tidak akan berkurang, bahkan jumlah uang tersebut bisa berkembang dan mendapatkan hasil yang nantinya akan dikembangkan kembali menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Termasuk kedalam pengertian wakaf uang ini adalah surat berharga. Kelestarian wakaf uang ini harus dijamin tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Sebagai perbandingan dalam Undang-Undang di Indonesia dan juga di Mesir. Benda yang boleh diwakafkan di Mesir sebelum berlakunya Undang-Undang Wakaf Mesir (UUWM) adalah Mazhab Hanafi, yaitu boleh mewakafkan benda tidak bergerak secara mutlak dan benda bergerak dengan syarat seperti diatas. Dasar ketetapan ini adalah bahwa wakaf harus *muabbad* (berlaku selamanya). Dan benda yang bisa dimanfaatkan selama-lamanya adalah benda tidak bergerak.

Namun demikian, boleh juga mewakafkan benda tidak bergerak sebagai pengecualian dari prinsip tersebut karena adanya dalil khusus berupa nash atau adat istiadat yang membolehkannya. Kemuadia UUWM memperbolehkan : (a) wakaf benda tidak bergerak, (b) wakaf benda bergerak, bukan sebagai pengecualian. Ketentuan ini disebutkan pada ayat 8 yang berbunyi :”boleh mewakafkan benda tidak bergerak dan benda bergerak”. Ini berarti UUWM tidak

mengikuti ketentuan Mazhab Hanafi tentang larangan mewakafkan benda bergerak yang tidak termasuk dalam benda tidak bergerak, atau tidak ada nash Al-Qur'an, atau tidak ada Sunnah yang membolehkan, atau tidak menjadi kebiasaan masyarakat mewakafkannya.

Dasar sikap UUWM tidak mengikuti ketentuan Mazhab Hanafi adalah karena tidak terdapat lagi faktor yang menyebabkan tidak sahnya wakaf benda bergerak, yaitu *ta'bid* (selama-lamanya) yang ditentukan sebagai salah satu syarat bagi benda yang diwakafkan, karena UUWM telah menganut asas boleh memberikan wakaf khairi, baik *muabbad* atau *muaqqat*. UUWM hanya mensyaratkan *muabbad* pada wakaf masjid dan wakaf untuk kepentingan masjid.

Ketetapan UUWM tersebut sesuai dengan Mazhab Maliki yang memperbolehkan wakaf benda tidak bergerak dan juga wakaf benda bergerak, baik benda bergerak tersebut mengikuti yang lain, baik ada nash yang membolehkannya atau tidak, karena Mazhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut Mazhab Maliki wakaf itu sah meskipun sementara.

Dengan ketentuan tersebut, maka UUWM melakukan dua hal, yaitu :

1. Memperluas sumber wakaf

Jika menurut mazhab Hanafi wakaf itu hanya boleh diberikan dalam bentuk benda tidak bergerak, maka dengan ketetapan tersebut sumber wakaf semakin luas meliputi berbagai bentuk, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah, sedangkan benda bergerak seperti mobil, kapal, mata uang, hewan dan lain-lain.

2. Memperluas kesempatan wakaf

Jika menurut mazhab Hanafi wakaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai benda tidak bergerak saja, maka dengan ketetapan ini masyarakat yang ingin berwakaf dengan benda bergerak, tanpa harus menukar hartanya yang bergerak menjadi tidak bergerak.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dirumuskan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-Undang ini mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun, Pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama pada Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi, yaitu untuk selamanya atau sementara.⁴⁶

Berbeda halnya dengan Undang-Undang wakaf di Mesir, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1946 juga menggabungkan pendapat para ulama fikih tentang wakaf. Dalam Pasal 146 dijelaskan, boleh melakukan wakaf selamanya (*muabbad*) atau selama waktu tertentu (*mu'qqad*) kecuali untuk wakaf masjid. Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan wakaf untuk masjid tidak akan terjadi kecuali untuk selamanya.

Hal ini jelas berbeda dengan Undang-Undang wakaf di Indonesia. Masalah *muabbad* dan *mu'qqad* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dilakukan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

⁴⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Op. Cit., h. 18

Namun, tidak dijelaskan tentang batasan *muabbad* dan *mu'aqqad*, seperti yang diatur dalam Undang- Undang wakaf Mesir yang menegaskan, bahwa wakaf untuk masjid harus bersifat *muabbad*.⁴⁷



⁴⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Op. Cit., h. 18

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung berdiri pada tahun 2014 dan dikukuhkan pada tahun 2015 di Lampung. Lahirnya lembaga wakaf di Provinsi Lampung adalah untuk terciptanya pengelolaan dan pengembangan wakaf yang produktif dan menghasilkan. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung mengadakan pengukuhan di aula Kementerian Agama Provinsi Lampung, pengukuhan dilakukan oleh ketua Badan Wakaf Provinsi Lampung H. Ikhsan Harianto.¹

BWI Provinsi Lampung merupakan suatu amanah Undang-Undang yang diharapkan dapat memberikan kemajuan dan tata kelola pengembangan wakaf yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya Provinsi Lampung. Mengingat wakaf di Provinsi Lampung sangat strategis dan dinamis yang terus dapat berkembang serta memberikan manfaat yang positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Anggota atau pengurus BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah untuk mengembangkan perwakafan di Lampung yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

¹ Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.²

Dalam kepengurusan BWI, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 47 bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan Perwakafan Nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung yang telah berdiri pada April 2014 sudah pada periode 2 dalam kepengurusannya.³ Susunan kepengurusan BWI masa jabatan Tahun 2014 -2017 menurut surat Keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 018/BWI/XII/2014:

Dewan Pertimbangan

Ketua : Komjen pol. (pur). Drs. Hj. Sjachroedin Z.,P.,S.H

Anggota : Drs. H. Abdurrahman, M.Ag
H. Mawardi, AS.

Badan Pelaksana

Ketua : H. Ikhsan Harianto

Wakil Ketua : Drs. H. Mansyuri Ismail

Sekretaris : Drs. Jamaludin, MM

² Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

³ Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

Bendahara : Ir. Hasyim

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir : Drs. H. Basyaruddin Maisyir

Pembinaan Nazhir : Defri Julian, SH

Pengelolaan dan

pemberdayaan Wakaf : Dr. H. Yusuf Baihaqi

Pengelolaan dan

pemberdayaan Wakaf : Drs. H. Najib

Hubungan Masyarakat : Hj. Istutiningsih, S.Sos., M.Kom.I

Kelembagaan dan

Bantuan Hukum : Drs. Hj. Muliawati, M. Ag

Penelitian dan

Pengembangan Wakaf : DR. H. Zakki Abu Bakar

Sumber data : Arsip SK Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung 2014

B. Landasan Hukum Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung

Pada era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi informasi ini, wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi kerakyatan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan krusial, terutama dari segi pengelolaan dan pengembangannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya merupakan acuan dan pedoman bagi lembaga atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam upaya menuju era yang produktif.

Badan Wakaf Indonesia membantu para *nazhir* untuk mengelola dan mengembangkan wakaf yang lebih produktif⁴ Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Peraturan Menteri Agama Nomor. 1 Tahun 1998 tentang

⁴ Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

peraturan pelaksanaan PP Nomor. 28 Tahun 1997 Tentang Pewakafan Tanah Milik Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompleksi Hukum Islam, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai Pawakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 , khususnya Pasal 5, 14(1), dan 49, PP Nomor. 28 Tahun 1977 tentang pewakafan tanah miilik.

C. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 56 disebutkan bahwa keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Selama periode jabatan 2014-2017 para pengurus menjalankan amanah visi dan misi BWI dengan mengelola wakaf dan membimbing nazhir untuk pengelolaan dan mengembangkan wakaf di Provinsi Lampung.

Pada November 2018 BWI melaksanakan pergantian pengurus baru. Dalam Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 050/BWI/P-BWI/2018 Tentang Penetapan Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 2018-2021.

Dewan Pertimbangan : H. M. Ridho Ficardo, S.Pi.,M.Si

Ketua : Drs. H. Suhaili, M. Ag

Anggota : Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH

Badan Pelaksana

Ketua : Ir. H. Firmansyah YA, MBA., MSc

Wakil Ketua : Drs. KH.Basyarudin Maisir

Sekretaris : H. Wasril Purnawan, SE., M.Si

Bendahara : Hj. Evi Sofwati, Lc., M. HI

Divisi-divisi

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Pembinaan Nazhir | : Drs. H. Adnan Nawawi |
| Pembinaan Nazhir | : Drs. H. M. Baijuri Rasyid, M. Ag |
| Pengelolaan dan pemberdayaan Wakaf | : Rahmat Mirzani Djausal, ST |
| Pengelolaan dan pemberdayaan Wakaf | : Drs. H. Mahatir Muhammad, SE., MM |
| Hubungan Masyarakat | : Dian Eka Darma Wahyuni |
| Kelembagaan dan Bantuan Hukum | : Drs. H. Asnan Sabirin, MM |
| Penelitian dan Pengembangan Wakaf | : Gandhi Liyorba Indr, M.Ag |

Sumber data : Arsip SK Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung 2018

Visi dan misi yang amanahkan kepada para pengurus ini tidaklah mudah, jadi untuk mewujudkannya dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi, serta strategi implementasi. Visi BWI adalah “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”. Sedangkan misinya yaitu “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”

D. Pengelolaan Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung

Badan wakaf Indonesia adalah lembaga yang mengelola harta benda wakaf. Pengelolaan wakaf di Indonesia mempunyai perbedaan dari negara lain, di

Indonesia semua masyarakat dapat menjadi *nazhir*, sedangkan di negara-negara lain *nazhir* hanya satu yaitu pemerintah negara itu sendiri. Jadi, BWI dapat mengelola benda wakaf hanya saja tidak semua aset benda wakaf.⁵

Badan Wakaf Indonesia mempunyai yang fungsi strategis dalam membantu pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam. Ditingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat.⁶ Dan minimnya jumlah harta wakaf yang dikelola secara produktif dibandingkan dengan besarnya potensi wakaf yang ada. Untuk itu, perlu mensosialisasikan dan mendorong masyarakat terutama *Nazhir* wakaf untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif.

Peran Badan Wakaf Indonesia menjadi semakin penting dalam memainkan perannya. Tugas pokok seperti mengadministrasi sampai dengan pengelolaan dana wakaf harus selaras dengan program yang telah dibuat. Namun dalam kenyataannya wakaf yang banyak dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia masih mencakup benda tidak bergerak, sedangkan untuk wakaf benda bergerak masih belum banyak dikelola secara maksimal baru wakaf benda bergerak berupa uang yang mereka mulai kelola, karna masih banyak masyarakat yang belum tahu benda- benda yang bisa diwakafkan selain tanah dan bangunan.

⁵ Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

⁶ Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

Pada zaman yang moderen ini banyak masyarakat yang makin kurang kesadarannya dalam melakukan wakaf yang tergolong sedekah jariyah. Maka dari itu Badan Wakaf Indonesia mulai mengembangkan wakaf benda bergerak yaitu uang. Karna dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf uang merupakan salah satu benda bergerak yang dapat dijadikan wakaf. Wakaf uang kini mulai jadi alternatif untuk masyarakat dalam melakukan wakaf. Sekarang masyarakat dapat mewakafkan uang yang mereka miliki untuk membantu umat Islam yang membutuhkan.⁷

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Badan Wakaf Indonesia baru mengembangkan wakaf benda bergerak yaitu uang. Wakaf uang dapat dikelola dan dikembangkan dengan dikumpulkan lalu disetorkan di salah satu Bank Syariah untuk diinvestasikan dan hasilnya dikelola untuk membantu pembangunan masjid, sekolah atau fasilitas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terkadang ada pula uang yang telah diwakafkan langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang agar bisa lebih bermanfaat dan membantu. Penyaluran hasil wakaf tersebut juga akan dikembangkan menjadi Mart (tempat perdagangan). Badan Wakaf Indonesia untuk wakaf benda bergerak lainnya belum dikembangkan dan dikelola. Karna memang jarang sekali ada masyarakat yang mewakafkan benda bergerak seperti kendaraan, logam mulia, surat berharga dan lain-lainnya.⁸

⁷ Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

⁸ Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

E. Hak Sewa Benda Bergerak dalam Perspektif Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya memecahkan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti penanganan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.⁹

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan, ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan Undang-Undang, wakaf dengan manajemen yang baik.¹⁰

⁹ Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

¹⁰ Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Dengan mengembangkan dan mengelola wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak secara lebih maksimal dan lebih fungsional. Benda bergerak dapat dikatakan wakaf yang sangat awam bagi para masyarakat Indonesia, oleh karena itu lembaga wakaf atau Badan Wakaf Indonesia mulai mengenalkan dan mengembangkan wakaf benda bergerak dengan lebih produktif dengan cara menyewakan benda wakaf. Benda bergerak yang telah diwakafkan dapat dikelola tidak hanya fungsinya melainkan dapat dikembangkan dan diambil manfaatnya dengan menyewakan benda wakaf tersebut. Dan hasil dari penyewaan benda wakaf tersebut yang nanti akan dipergunakan untuk membantu memajukan kesejahteraan masyarakat.

Harta wakaf mempunyai peran nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, peran ini terlalu kecil dari yang seharusnya diberikan, hal ini terjadi karena sempitnya cakupan saluran wakaf yang ada. Dari segi kuantitas, potensi wakaf itu cukup besar apalagi dilihat dari potensi kaum muslimin. Minimnya jumlah harta wakaf yang dikelola secara produktif dibandingkan dengan besarnya potensi wakaf yang ada. Untuk itu perlu mensosialisasikan dan mendorong masyarakat terutama *nazhir* wakaf untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif.

Banyaknya harta benda wakaf yang rusak khususnya bangunan, dan lahan pertanian, mengakibatkan harta bend wakaf tersebut tidak mendatangkan manfaat apapun. Mengenai harta benda wakaf yang rusak, solusinya bisa melalui penggantian (*Istibdal*). Jika bangunan yang sudah rusak, maka penggantian

dilakukan dengan cara meruntuhkan dan membangunnya kembali, atau menukar dengan wakaf yang baru dalam bentuk alih fungsi wakaf. Bangunan baru tersebut bisa lebih mendatangkan manfaat kepada umat daripada membiarkannya terlantar.

Berdasarkan hal-hal tersebut Badan Wakaf Indonesia mulai mengembangkan pengelolaan wakaf benda bergerak yang mempunyai banyak fungsi untuk perkembangan wakaf yang lebih baik. Wakaf benda bergerak seperti hak sewa merupakan salah satu wakaf yang perlu banyak pengembangan dan pengenalan kembali kepada masyarakat. Karna masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf benda bergerak. Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Benda bergerak yang dapat diwakafkan yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.

Dalam perkembangan BWI Provinsi Lampung,, wakaf benda bergerak yang telah dikelola dan dikembangkan adalah wakaf benda bergerak berupa uang. Dimana wakaf uang ini merupakan suatu inovasi dari benda wakaf yang coba dikembangkan dalam perwakafan Provinsi Lampung. Wakaf uang sebenarnya telah dikenal sejak zaman Dinasti Usmaniyah dan Mamalik. Wakaf uang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan juga pelayanan sosial.¹¹

Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan, yaitu *pertama* benda digolongkan sebagai benda karena sifatnya yang dapat berpindah atau karena ketetapan Undang-Undang meliputi, kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor.

^{11 11} Evi Sofwati, (bendahara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Teluk Betung 22 Januari 2019 Pukul 11.15 WIB

Kedua benda terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan seperti kayu dan beras dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian seperti kendaraan bermotor, dan perhiasan emas dan berlian. *Ketiga* benda yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan seperti makanan dan minuman, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. *Keempat* benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah seperti tanah, dan bangunan.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi, kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan/atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi, surat berharga : saham, surat utang negara, obligasi dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Hak atas kekayaan intelektual : hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak lainnya. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa : hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Wakaf hak sewa benda bergerak menurut BWI sangatlah efisien dan sangat berpotensi mengembangkan perwakafan di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Dengan berkembangnya zaman dan makin padatnya penduduk

yang bermukim, masyarakat makin susah untuk untuk mewakafkan benda tidak bergerak. Oleh karena itu, wakaf benda bergerak cukup mempermudah masyarakat yang berkeinginan untuk mewakafkan sebagian harta mereka, baik wakaf uang, surat berharga, logam mulia dan kendaraan dapat mereka wakafkan dan dapat membantu masyarakat yang lebih membutuhkan.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Hak Sewa Benda Bergerak sebagai Objek Wakaf Produktif

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif, aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Ajaran Islam juga menganjurkan kepada umatnya untuk meraih kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat dengan cara memenuhi segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum di utus-Nya Nabi Muhammad Saw merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam di akomodir di format menjadi ajaran Islam sehingga lebih teratur dan bernilai imaniyah.

Keberadaan wakaf adalah sangat dinamis dan luwes, dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman dengan prinsip dan tujuan Islam. Tujuan ajaran syariat Islam adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, wakaf menempati urutan ketiga dari kemaslahatan yang ditawarkan Islam, yaitu *mashlahat tahsiniyat*. Pada prinsipnya, wakaf mengandung kemaslahatan dimana investasi bagi *waqif* sendiri memperoleh pahala dari Allah Swt dan dapat membangun ekonomi umat.

Dalam era modern, perkembangan wakaf dalam mengembangkan wakaf benda bergerak cukup pesat. Badan wakaf Indonesia sebagai lembaga yang menangani dan membimbing *nazhir* untuk kemajuan dan perkembangan wakaf

sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Untuk daerah Lampung, lembaga wakaf ini masih banyak memulai semua penanganan wakaf dengan cara membimbing *Nazhir* terlebih dahulu dan pelan-pelan mulai mengenalkan lembaga BWI ini di Masyarakat. Mengetahui khususnya di Lampung lembaga BWI ini terbentuk belum lama dan baru berjalan 2 periode. Maka untuk pengembangan wakaf masih perlu dilakukan pengamanan dan perlu ditingkatkan nilai produktif dengan dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga *kenazhiran* dan BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, mengembangkan rumah sakit Islam dan bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana ibadah.

Untuk itulah Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai fungsi sangat strategis yang dibentuk diharapkan dapat membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para *Nazhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya.

Kebiasaan Masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, panti asuhan, kuburan dan lain sebagainya. Dalam perkembangan zaman dilihat dari kekekalan fungsi dan manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang

bergerak dapat diwakafkan. Barang bergerak yang dapat diwakafkan, seperti uang, saham, kendaraan baik mobil atau pun motor. Benda tersebut juga tidak hanya dapat diwakafkan fungsinya, tetapi manfaat benda tersebut juga dapat diwakafkan, seperti menyewakan wakaf benda bergerak dan hasil sewa tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Harta wakaf itu harta yang terpisah, tidak mengikuti pada yang lain apabila harta itu hart yang dapat dibagi dan dapat diserahterimakan. Dikalangan mazhab Syafi'I dan Hambali mensyaratkan benda wakaf itu jelas, tidak berada dalam tanggungan, benda wakaf itu merupakan benda milik dari *waqif* yang dapat diserahterimakan, benda wakaf itu dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat, dan pemanfaatan benda itu berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan benda itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan, minuman maka wakafnya tidak sah, karena benda ini akan habis karena pemanfaatannya. Begitu juga tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat, seperti anjing dan babi. Menurut mereka mewakafkan benda bergerak, seperti kuda untuk dikendarai, peralatan perang untuk tentara yang sedang berjihad, air, dan cat untuk memakmurkan masjid, mushaf, buku dan sejenisnya, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan rumah boleh dilakukan.

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Karena itu benda wakaf haruslah bertahan lama dan tidak cepet rusak. Namun demikian, wakaf tidak terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak saja, akan tetapi dapat berupa

benda bergerak.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa macam-macam harta wakaf adalah :

- a. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktik wakaf yang dilakukan sahabat ‘Umar ibn al-Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah Saw. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Najjar yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.
- b. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariyahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.

Berdasarkan hal di atas, hak sewa benda bergerak dapat menjadi wakaf yang produktif karena benda wakaf yang hanya dapat dinikmati nilai dan manfaatnya kini bisa dimanfaatkan lebih baik dengan cara disewakan. Hal tersebut sangat berpotensi untuk lebih meningkatkan pemanfaatan benda wakaf dan lebih produktif dalam pola pengembangan benda wakaf itu sendiri.

B. Pandangan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung tentang Wakaf Hak Sewa Benda Bergerak

Badan wakaf Indonesia Provinsi Lampung selaku lembaga yang mengembangkan wakaf dengan cara memanfaatkan benda wakaf. Dalam pengembangan benda wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak, BWI mulai dengan mengelola tanah dan bangunan wakaf yang kurang produktif dikelola dengan dibangun sarana ibadah atau pendidikan. Dan untuk pemanfaatan wakaf benda bergerak BWI ingin mencoba menyewakan benda wakaf berupa benda bergerak seperti kendaraan.

Wakaf yang biasanya hanya diwakafkan bendanya saja kini bisa dikembangkan dengan cara menyewakan benda wakaf tersebut. Wakaf benda bergerak seperti kendaraan dapat dimanfaatkan dengan menyewakan kepada orang lain dan hasil dari sewa benda wakaf tersebut lalu dikelola dan digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Karena menurut BWI menyewakan benda wakaf adalah hal yang sangat menunjang untuk pemanfaatan benda wakaf itu sendiri. Selain dapat dijadikan bangunan atau dijadikan fasilitas lain, benda wakaf yang disewakan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dan cukup membantu pengembangan wakaf yang produktif.

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab menangani masalah wakaf, berharap wakaf dapat berkembang lebih baik dan lebih produktif. Wakaf benda bergerak seperti kendaraan memang wakaf yang tergolong wakaf yang diambil manfaatnya. Agar dapat dikelola dengan baik maka wakaf tersebut dapat dilakukan dengan disewakan. Dengan hasil sewa tersebut

digunakan untuk membangun sekolah, masjid dan untuk diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perspektif Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf hak sewa benda bergerak sangatlah relevan dan baik untuk dikelola dimasa modern ini. Dengan lebih memanfaatkan benda wakaf yang ada dapat diperoleh hasil dari wakaf hak sewa tersebut dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih baik lagi dan lebih menunjang perekonomian. Namun dalam Badan Wakaf Indonesia wakaf benda bergerak belum dikembangkan secara maksimal. Badan Wakaf Indonesia baru mulai mengembangkan Wakaf benda bergerak berupa uang, sedangkan wakaf benda bergerak yang lain belum terlaksana.

C. Benda bergerak yang di kelola oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan ketentuan wakaf dari pengelolaan wakaf, benda wakaf, serta lembaga yang bertanggung jawab terhadap wakaf. Dalam Pasal 16 disebutkan benda yang boleh dijadikan wakaf baik benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Namun dalam kenyataannya wakaf yang banyak dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia masih mencakup benda tidak bergerak, sedangkan untuk wakaf benda bergerak masih belum banyak dikelola secara maksimal baru wakaf benda bergerak berupa uang yang mereka mulai kelola, karna masih banyak masyarakat yang belum tahu benda- benda yang bisa diwakafkan selain tanah dan bangunan.

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung mulai mengembangkan wakaf benda bergerak, dari yang biasanya benda wakaf yang banyak dikelola hanya benda wakaf tidak bergerak kini BWI mencoba mengelola benda bergerak. Namun, karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh BWI, benda bergerak yang baru mulai bisa dikembangkan oleh BWI hanya benda bergerak berupa uang. Benda bergerak seperti surat berharga, logam mulia, dan kendaraan belum dapat dikelola dan dikembangkan oleh BWI, karena memang tidak ada masyarakat yang mewakafkan benda bergerak tersebut.

Wakaf benda bergerak yang dikelola BWI masih cukup baru, dan masih mudanya lembaga ini di Provinsi Lampung juga menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mewakafkan sedikit harta benda mereka. Hal itu membuat BWI pelan-pelan dan pengelolaan wakaf benda bergerak ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Badan Wakaf Indonesia baru mengembangkan wakaf benda bergerak yaitu uang. Wakaf uang dapat dikelola dan dikembangkan dengan dikumpulkan lalu disetorkan di salah satu Bank Syariah untuk diinvestasikan dan hasilnya dikelola untuk membantu pembangunan masjid, sekolah atau fasilitas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terkadang ada pula uang yang telah diwakafkan langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang agar bisa lebih bermanfaat dan membantu. Badan Wakaf Indonesia untuk wakaf benda bergerak lainnya belum dikembangkan dan dikelola. Karna memang jarang sekali ada masyarakat yang

mewakafkan benda bergerak seperti kendaraan, logam mulia, surat berharga dan lain-lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap perspektif badan wakaf indonesia tentang hak sewa benda bergerak sebagai objek wakaf pada badan wakaf indonesia provinsi lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Wakaf hak sewa benda bergerak dapat menjadi wakaf yang produktif, karena benda wakaf tidak hanya dapat dinikmati nilai dan maanfaatnya, tetapi kini bisa dimanfaatkan lebih baik dengan cara disewakan. Hal tersebut sangat berpotensi untuk lebih meningkatkan pemanfaatan benda wakaf dan lebih produktif dalam pola pengembangan benda wakaf itu sendiri. Dilihat khusus di Lampung masih minimnya jumlah harta wakaf yang dikelola secara produktif dibandingkan dengan besarnya potensi wakaf yang ada. Untuk itu, perlu mensosialisasikan dan mendorong masyarakat terutama *Nazhir* wakaf untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif.
2. Pandangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang hak sewa benda bergerak sebagai objek wakaf dapat sangat membantu perkembangan pengembangan pengelolaan wakaf. Maka Badan Wakaf Indonesia setuju dengan adanya hak sewa benda bergerak. Benda wakaf dapat lebih mudah dikelola dan di kembangkan sesuai dengan kebutuhan umat pada masa sekarang. Di zaman modern ini wakaf benda tidak bergerak dan benda

bergerak lebih dikembangkan dengan cara menyewakannya. Tujuan dari menyewakan benda wakaf agar wakaf lebih produktif dan dapat dimanfaatkan kembali untuk hal lain demi kemaslahatan umat.

3. Benda wakaf meliputi benda tidak bergerak (tanah, bangunan, dan tanaman) serta benda bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan lain sebagainya). Badan Wakaf Indonesia mengembangkan wakaf dan mengelola benda wakaf masih meliputi benda tidak bergerak, sedangkan untuk wakaf benda bergerak baru wakaf uang yang dikelola di Badan Wakaf Indonesia. Untuk benda bergerak lainnya belum ada pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung ini.

B. Saran

1. Wakaf adalah anjuran dalam agama Islam yang dijadikan amal jariyah. Pengetahuan masyarakat tentang benda- benda wakaf masih cukup kurang khususnya masyarakat pedesaan dan masyarakat yang ilmu agamanya masih bisa disebut kurang. Jadi, alangkah baiknya *nazhir* dan lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung lebih memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
2. Menyewakan wakaf benda bergerak sangat jarang dijumpai di kehidupan masyarakat. Maka sangat perlu dibuat atau terbitkan buku-buku wakaf yang lebih modern, dengan membahas cara mengembangkan benda wakaf dengan mengambil manfaatnya. Dan mengadakan penyuluhan atau berbagi pengetahuan tentang benda-benda yang bisa diwakafkan kepada masyarakat.

3. Pengelolaan benda wakaf khususnya benda bergerak perlu pengembangan yang lebih lagi, karena hal itu dapat menjadi program wakaf yang sangat produktif dan membantu masyarakat dalam proses beribadah untuk mendapatkan amal Jariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Az- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Jakarta. Gema Insani. 2011.
- Dahlia Haliah Ma'u. "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang *Ibdal* dan *Istibdal* Benda Wakaf". *Jurnal Al Adalah*, VOL 13 No 1 2016. (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016). (on-line). tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1129/930> (17 Januari 2019 Pukul 20:15 WIB).
- Departemen Agama RI. *Al- qur'an dan terjemahnya mushaf ar-rasyid*. Jakarta. Maktabah Al- fatih. 2016.
- , *Fiqih Wakaf*. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan wakaf dan Ditjen Bimas Islam. 2007
- , *kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam. 1991.
- , *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2007.
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan wakaf dan Ditjen Bimas Islam. 2009.
- Departemen dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1988.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar*. diterjemahkan oleh K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa. Surabaya. CV Bina Iman. 2007.
- Kementrian Agama RI. *Dinamika Perwakafan : di Indonesia dan berbagai belahan Dunia*. Jakarta. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2015.
- , *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2015.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta. Renika Cipta. 2015.
- Muhamad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta Penerbit Universitas Indonesia. 1988.

- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta. Lentera Basritama. 2004.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Juz III*. Indonesia. Maktabat Dahlan. T,Th.
- Nasution. *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*. Bandung. Bumi Aksar. 1996.
- Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta. Khalifa. 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1997.
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2016.
- , *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta. Rajawali Pers. 2015
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*. Jakarta. Rajawali Pers. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *fikih sunnah jilid 14*. Bandung. Alma'arif. 1996
- Said, Agil Husin Al-Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta. Penamadani. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2015.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Suhendi, Hendi. *fiqh Muamalah*. Jakarta. Rajawali Press. 2008
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung. Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013.